



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Lembaga Pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, selain itu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merupakan OPD Pemerintah sektor pendidikan juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan/penyelenggaraan pemerintahan pada sektor pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan khusus, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Dengan telah terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana pelaporan dan evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dinas untuk lebih baik lagi pada masa mendatang.

Surabaya, Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19630127 198903 1 005**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 1 unit eselon II, 39 unit eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat, 4 bidang, 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 24 Cabang Dinas serta kelompok fungsional. Masing – masing unit kerja memiliki tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 81 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

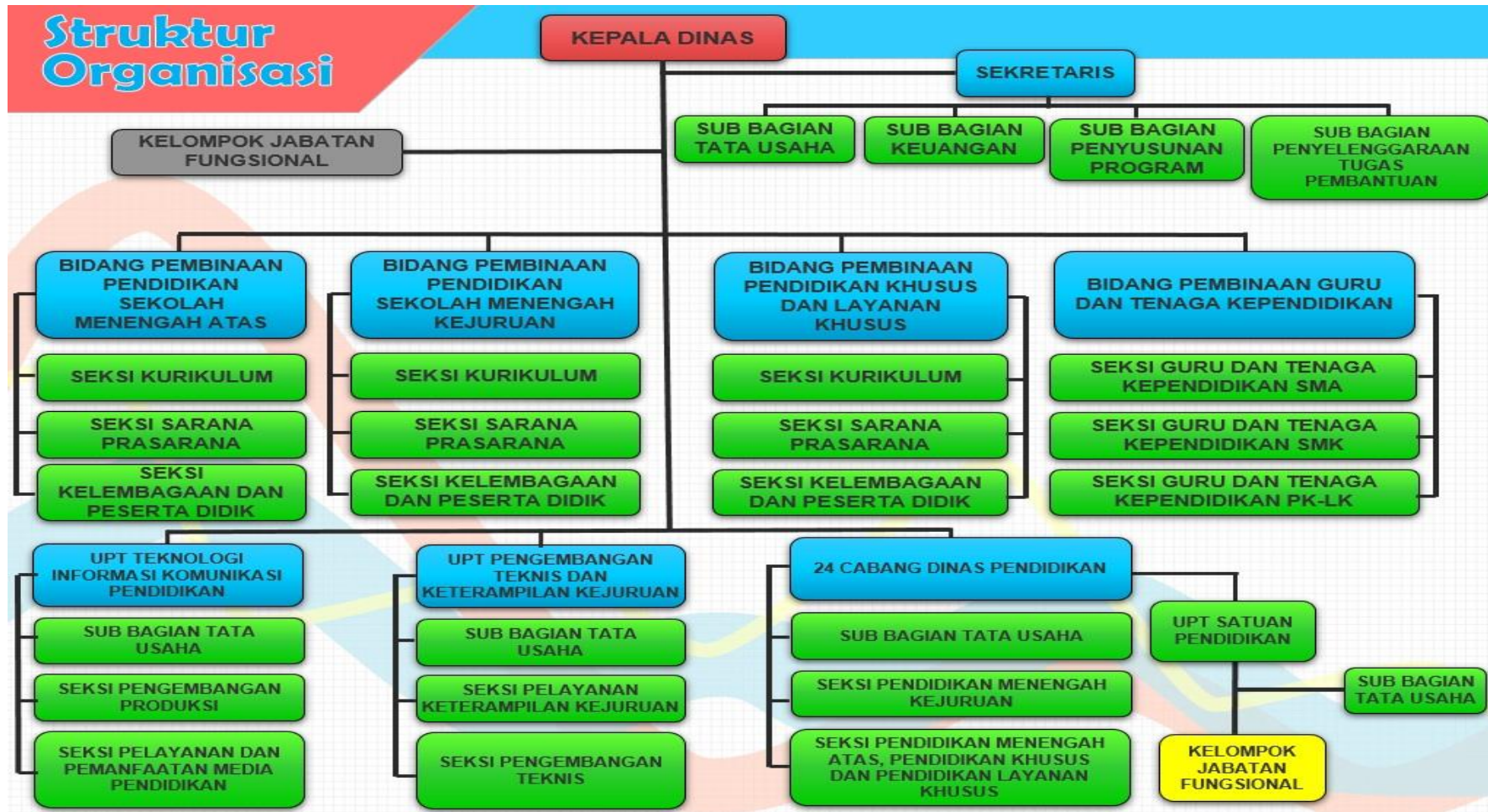
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
8. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan
9. Cabang Dinas Pendidikan
10. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi:
  - a. Sub Koordinator;
  - b. Pengawas Sekolah;
  - c. Statistisi;
  - d. Analis Pegawai; dan
  - e. Arsiparis.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:



**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**



## B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Bab III, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa **"Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan serta tugas pembantuan."**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## C. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan serta tugas pembantuan. Dalam melakukan urusan pemerintahan ini, masih terdapat permasalahan-permasalahan permasalahan sebagaimana berikut.

Masalah Pokok	:	Implementasi penyusunan program dan kegiatan melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial belum optimal.	
a	Masalah 1	:	Keterbatasan Jumlah Guru Terampil
	Akar Masalah 1	:	Jumlah guru terampil dan berkualitas belum tersebar di daerah-daerah terpencil dan terpinggir. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri, lebih banyak guru yang lebih memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan. Sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas

			lulusan peserta didik, yang menyebabkan lulusan yang tinggal di pelosok tidak begitu ter <i>ekspose</i> .
b	Masalah 2	:	Sarana dan Prasarana Tidak Memadai
	Akar Masalah 2	:	Sarana dan prasarana yang terdapat di pinggiran belum memadai seperti yang terdapat di kota.
c	Masalah 3	:	Bahan Pembelajaran yang masih Minim
	Akar Masalah 3	:	Terbatasnya jumlah bahan pembelajaran bukan satu-satunya penyebab utama melainkan minimnya minat baca (literasi) juga merupakan salah satu pendukung minimnya bahan pembelajaran.
d	Masalah 4	:	Biaya Pendidikan yang Masih Mahal
	Akar Masalah 4	:	Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah tidak tepat sasaran atau digunakan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan.
e	Masalah 5	:	Mutu Pendidikan yang Masih Rendah
	Akar Masalah 5	:	Perspektif masyarakat secara umum yang masih menganggap bahwa menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri.
f	Masalah 6	:	Minoritas bagi Kelompok Disabilitas
	Akar Masalah 6	:	Masih banyak pembangunan sekolah yang belum ramah dengan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Jika standar pembangunan distandarkan untuk orang pada umumnya, maka ABK akan mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas sekolah.

## D. ISU STRATEGIS

### 1. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di Masa Pandemi

Membangun budaya bersih dan sehat oleh warga sekolah sangat penting dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Di tengah upaya pembatasan penyelenggaraan pembelajaran, penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) adalah salah satu solusi dalam sektor pendidikan saat ini. Pertimbangan utama penyelenggaraan PTMT terbatas adalah keselamatan, kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta upaya mengurangi dampak negatif pandemi terhadap psikologi perkembangan anak dan terjadinya learning loss. Untuk itu, pada bulan Maret 2021 yang lalu, pemerintah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Melalui SKB 4 Menteri

tersebut, pemerintah mendorong akselerasi PTM terbatas sesuai kondisi sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan serta mendorong pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Sementara itu, Plt. Dirjen P2P Kemenkes mengimbau para guru dan tenaga kependidikan untuk tidak ragu divaksinasi. Saat ini pemerintah terus mendorong percepatan pencapaian target vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mendukung kegiatan PTMT, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Biro Kesra Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, LPMP Provinsi Jawa Timur, BP PAUDNI, dan Kantor Wilayah KEMENAG Jawa Timur melakukan Monitoring dan Pembinaan Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Adapun lembaga yang menjadi sasaran monitoring adalah SMKN 2 Jombang, SMAN Kalianget, SMAN 1 dan 3 Pamekasan. Hasil dari monitoring tersebut adalah lembaga yang dikunjungi sudah baik dalam menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. PTM dilaksanakan dalam 2 shift 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Protokol yang ketat tersebut berlaku kepada semua warga sekolah termasuk orang tua siswa. Kemudian Pembinaan yang dilakukan oleh tim antara lain dalam hal administrasi seperti pernyataan persetujuan pembelajaran tatap muka, checklist kesiapan perlengkapan hingga pengaturan pedagang dan warung.

## **2. Sekolah Penggerak**

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

Empat tahapan proses transformasi menuju sekolah penggerak dengan 4 variabel yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

### **1. Hasil Belajar**

- a. Tahap 1 : minimal 3 tingkat di bawah level yang diharapkan
- b. Tahap 2 : 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan
- c. Tahap 3 : di level yang diharapkan
- d. Tahap 4 : di atas level yang diharapkan



## 2. Lingkungan Belajar

- a. Tahap 1 : perundungan menjadi norma
- b. Tahap 2 : perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma
- c. Tahap 3 : perundungan tidak terjadi
- d. Tahap 4 : aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan

## 3. Pembelajaran

- a. Tahap 1 : secara rutin mengalami gangguan
- b. Tahap 2 : belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid
- c. Tahap 3 : sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa
- d. Tahap 4 : berpusat pada murid

## 4. Refleksi Diri dan Pengimbasan

- a. Tahap 1 : -
- b. Tahap 2 : -
- c. Tahap 3 : perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri serta guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran
- d. Tahap 4 : perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi, serta guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

Manfaat untuk sekolah dalam melaksanakan program sekolah penggerak adalah:

1. Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran
2. Percepatan digitalisasi sekolah
3. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila
4. Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru
5. Kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain
6. Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah

## **3. Guru Penggerak**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) mengajak para insan pendidikan terbaik bangsa untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia dengan mendaftar menjadi Guru Penggerak. Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

#### **4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar. Indikator capaian SPM Dinas Pendidikan adalah Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dan Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Indikator capaian ini di *breakdown* menjadi beberapa indikator kinerja/jenis layanan SPM yaitu untuk Jenjang SMA, SMK, dan SLB adalah buku teks pelajaran, perlengkapan belajar, penyediaan biaya personil peserta didik, kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi minimal DIV/S1, kualitas pendidik yang berkualifikasi minimal DIV/S1, kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi minimal SMA/ sederajat, satuan pendidikan berakreditasi minimal C, serta jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan. Untuk peningkatan capaian SPM untuk siswa dan sekolah, Dinas Pendidikan telah menyusun program pemberian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) kepada seluruh sekolah di Jawa Timur baik negeri maupun swasta. Selain itu terdapat workshop/bimbingan teknik untuk para guru agar dapat meningkatkan kompetensi dari segi kualifikasi maupun perolehan sertifikat pendidik sehingga SPM untuk guru dapat tercapai.

#### **5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan (Pendidikan), dan Standar hidup layak. Manfaat IPM antara lain (1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), (2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, serta (3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perubahan indikator pada perhitungan indeks pengetahuan (pendidikan) dari awalnya menggunakan komponen angka melek huruf menjadi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Sedangkan dengan memasukkan rata-rata

lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bergerak di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan mendukung tercapainya indeks pendidikan yang merupakan indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Indeks pendidikan di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022 sebesar 0,64, nilai ini memberi kontribusi untuk nilai IPM Jawa Timur (IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 72,75).

## **6. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan/Program yang dihasilkan harus beresponsif gender, responsif gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Pada Dinas Pendidikan, program pengelolaan pendidikan memiliki kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan, dan Khusus. Dengan indikator program yaitu prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA, prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK, prosentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus, prosentase pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan SPM, prosentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi / sistem dalam proses belajar mengajar, dan prosentase peserta yang lulus kompetensi. Serta *outcomenya* adalah prosentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB) tercapai. Untuk mencapai *outcome* tersebut dibutuhkan biaya sebesar 1.245.259.173.667 rupiah.

## **7. Innovative Government Award (IGA)**

*Innovative Government Award* (IGA) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penganugerahan *Innovative Government Award* (IGA) 2021 merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pengukuran indeks inovasi daerah. Mengutip dari Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* dan Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah, Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri 104/2018). Sedangkan tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif adalah:

- a. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
- b. Mendorong penerapan *good governance*;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
- d. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaporan inovasi daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui pengukuran mandiri dalam aplikasi *Innovative Government Award* (IGA) 2021, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melaporkan inovasi daerah sebanyak 67 judul dan 46 judul tidak dilanjutkan karena tingkat kematangan inovasi kurang maksimal (kurang dari 120) sedangkan 21 judul dilaporkan untuk mendapatkan penilaian dari BPP KEMENDAGRI (Badan Penelitian dan Pengembangan) KEMENDAGRI dengan pertimbangan memiliki tingkat kematangan di atas 120;
2. Dua puluh satu judul inovasi oleh 20 lembaga yang dilaporkan telah mendapatkan nomor induk atau nomer register pengesahan dari KEMENDAGRI;
3. Terkait 46 judul inovasi yang diterapkan pada tahun 2021 dapat dilaporkan kembali pada tahun 2022 dengan catatan nilai kematangan lebih dari 121 dan

menyertakan video yang diunggah di *youtube* karena video tersebut menjadi syarat utama pelaporan.

Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur menjadi Nominator Pemerintah Daerah Terinovatif Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2021.

## E. STRATEGI UTAMA DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

	Masalah Pokok	:	Implementasi penyusunan program dan kegiatan melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial belum optimal.
a	Masalah 1	:	Keterbatasan Jumlah Guru Terampil
	Akar Masalah 1	:	Jumlah guru terampil dan berkualitas belum tersebar di daerah-daerah terpencil dan terpinggir. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri, lebih banyak guru yang lebih memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan. Sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik, yang menyebabkan lulusan yang tinggal di pelosok tidak begitu ter <i>ekspose</i> .
	Solusi penanggulangan masalah	:	Pemerataan guru melalui analisis kebutuhan guru di setiap sekolah sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
b	Masalah 2	:	Sarana dan Prasarana Tidak Memadai
	Akar Masalah 2	:	Sarana dan prasarana yang terdapat di pinggiran belum memadai seperti yang terdapat di kota.
	Solusi penanggulangan masalah	:	Penyediaan bantuan sarana prasarana bagi sekolah yang membutuhkan. Selain bantuan dari Provinsi, terdapat juga bantuan dari Pemerintah Pusat seperti DAK Fisik dengan kebijakan sebagai berikut : pemenuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah secara keseluruhan, Kepala Sekolah fokus pada proses pembelajaran dan tidak pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana, serta melibatkan Dinas PUPR melakukan assesmen kerusakan bangunan untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah.
c	Masalah 3	:	Bahan Pembelajaran yang masih Minim

	Akar Masalah 3	:	Terbatasnya jumlah bahan pembelajaran bukan satu-satunya penyebab utama melainkan minimnya minat baca (literasi) juga merupakan salah satu pendukung minimnya bahan pembelajaran.
	Solusi penanggulangan masalah	:	Membangkitkan kembali minat membaca melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN) berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLN merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia.
d	Masalah 4	:	Biaya Pendidikan yang Masih Mahal
	Akar Masalah 4	:	Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah tidak tepat sasaran atau digunakan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan.
	Solusi penanggulangan masalah	:	Penyediaan pendanaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada sekolah, untuk membantu pendanaan baik personalia maupun non personalia, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
e	Masalah 5	:	Mutu Pendidikan yang Masih Rendah
	Akar Masalah 5	:	Perspektif masyarakat secara umum yang masih menganggap bahwa menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri.
	Solusi penanggulangan masalah	:	Bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengedukasi warga secara persuasif bahwasannya pendidikan adalah kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu.
f	Masalah 6	:	Minoritas bagi Kelompok Disabilitas
	Akar Masalah 6	:	Masih banyak pembangunan sekolah yang belum ramah dengan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Jika standar pembangunan distandarkan untuk orang pada umumnya, maka ABK akan mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas sekolah.



	Solusi penanggulangan masalah	:	Penyediaan fasilitas sekolah yang ramah ABK di sekolah-sekolah reguler yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah sekolah inklusi yang masih terbatas dan belum merata. Di sekolah inklusi, ABK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya, dapat mendorong kepercayaan diri, serta dapat memberikan kesempatan belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebaya.
--	-------------------------------	---	---

**F. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)**

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Program	Pagu Anggaran
Kepala Daerah/ Gubernur	1	2	3	Eselon II	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>0,65</b>		<b>SASARAN 1</b>						<b>7.933.673.688.266</b>
					<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan di Tahun 2022	81,3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	83,43	4.039.430.112.792
									Persentase Realisasi anggaran	91	
									indeks Profesionalitas ASN	88,5	
									Prosentase Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil kegiatan tepat waktu	100	
					<b>SASARAN 2</b>						

			<b>Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus</b>	APM Pendidikan Menengah (SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB)	72,374	Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase warga negarausia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA	40,64	3.890.842.112.077
				Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yg mendapatkan layanan pendidikan bermutu			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK	33,62	
							Prosentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	33,58	

							Prosentase pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan SPM	55,7	
							Prosentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/ sistem dalam proses belajar mengajar	32	
							Prosentase Peserta yang lulus kompetensi	100	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	84,02	

							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	43,08	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Malang;	92,18	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Malang;	68,94	

							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Madiun	74,31	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Madiun	48,35	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kediri	67,89	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang	50,59	



						Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kediri		
						Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Mojokerto	83,51	
						Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Mojokerto	36,97	
						Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Blitar	64,09	

							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Blitar	51,01	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pasuruan	62,06	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pasuruan	38,64	

							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Probolinggo	67,82	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Probolinggo	21,18	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Gresik	82,56	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk	25,98	

							Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Gresik		
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jombang	92	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jombang	39,49	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah	75,99	

							Wilayah Bojonegoro		
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bojonegoro	34,38	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Lamongan	88,98	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi	17,69	

							Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Lamongan		
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Ponorogo	78,04	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo	28,96	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan	72,8	



							menengah Wilayah Pacitan		
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pacitan	55,16	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Nganjuk	83,49	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam	37,64	

							Pendidikan Khusus Wilayah Nganjuk		
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Tulungagung	70,7	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Tulungagung	37,05	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah	70,08	

						Wilayah Kabupaten Malang		
						Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Malang	24,26	
						Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jember	64,34	
						Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan	27,25	

							Khusus Wilayah Jember		
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bondowoso	64,05	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo	14,58	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah	73,11	

							Wilayah Banyuwangi		
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah banyuwangi	50,8	
							Prosentase warga negara a usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pamekasan	62,81	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan	16,73	

							Khusus Wilayah Pamekasan		
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sampang	39,72	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sampang	6,13	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kab. Sumenep	66,41	



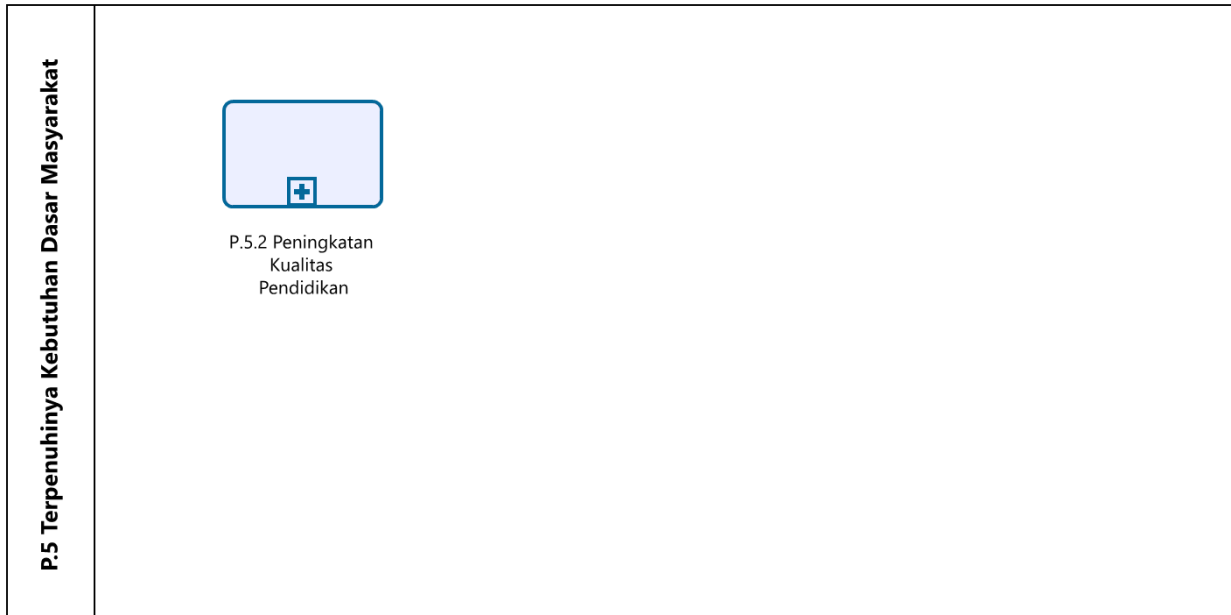


				<b>Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus</b>	Prosentase Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus	73	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi	85	3.401.463.397
							PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase lembaga yang mendapatkan rekomendasi	0	0

## G. PETA PROSES BISNIS

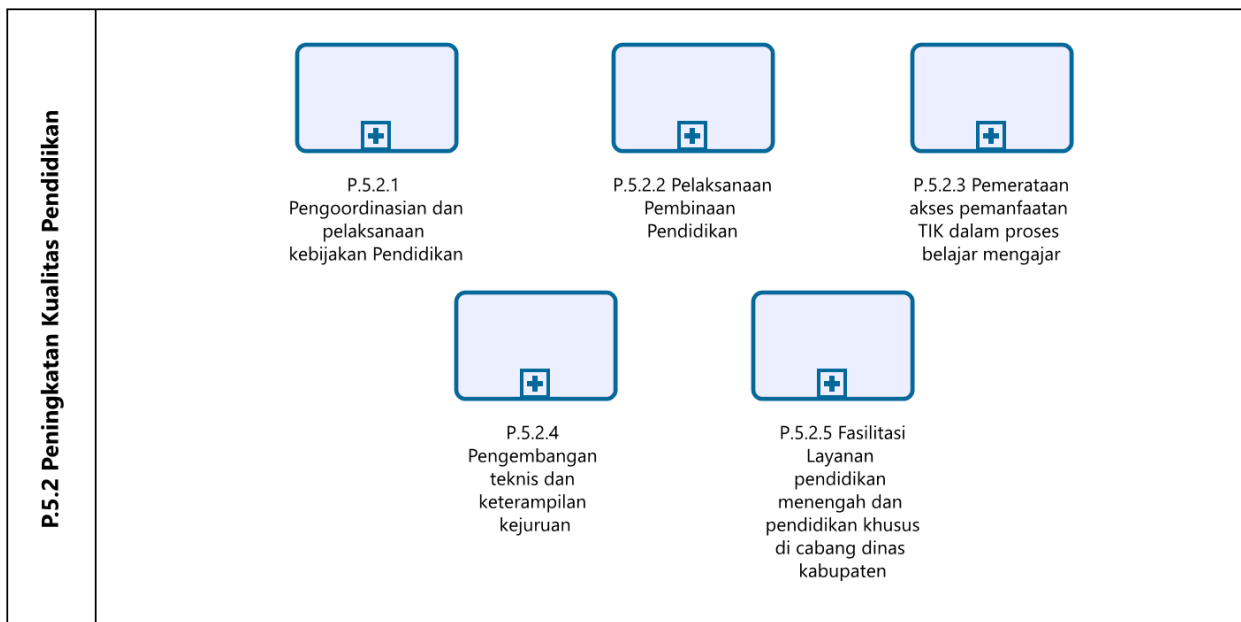
**GAMBAR 1.2**

### **PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (bag.1)**



**GAMBAR 1.3**

### **PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (bag.2)**



## GAMBAR 1.4

### PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (bag.3)

<b>P.5.2.1 Pengoordinasian dan pelaksanaan Kebijakan Pendidikan</b>	<div data-bbox="386 344 537 443"></div> <p data-bbox="386 464 537 590">P.5.2.1.1 Melakukan pemerataan kesempatan siswa usia 16-18 tahun bersekolah dijenjang menengah</p> <div data-bbox="683 344 834 443"></div> <p data-bbox="683 464 834 590">P.5.2.1.2 Melakukan pemerataan kesempatan partisipasi penduduk disabilitas usia 4-18 tahun</p> <div data-bbox="967 344 1118 443"></div> <p data-bbox="967 464 1118 590">P.5.2.1.3 Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum</p>
---	--

<b>P.5.2.2 Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan</b>	<div data-bbox="407 1020 558 1119"></div> <p data-bbox="407 1140 558 1224">P.5.2.2.1 Peningkatan layanan kebutuhan profesi pendidik dan tenaga kependidikan</p>
---	---

**P.5.2.3 Pemerataan akses pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar**

P.5.2.3.1 Pengembangan metode belajar mengajar menggunakan TIK

P.5.2.3.3 Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan

**P.5.2.4 Pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan**

P.5.2.4.1 Penyusunan dan pengembangan materi teknis keterampilan kejuruan

P.5.2.4.2 Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan

P.5.2.4.3 Pengembangan media teknis pelatihan dan bimbingan keterampilan kejuruan

P.5.2.4.4 Pelaksanaan dukungan kerjasama pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan

**P.5.2.5 Fasilitasi Layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di cabang dinas kabupaten**



P.5.2.5.1 Fasilitasi Layanan pendidikan gratis berkualitas



P.5.2.5.2 Fasilitasi Layanan administrasi lembaga sekolah

## H. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 700/40038/031.2/2022 Tanggal 19 September 2022 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 82,6 atau predikat A dengan rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.1**  
**TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
a	Perencanaan Kinerja	30%	<b>22,50</b>
b	Pengukuran Kinerja	30%	<b>26,86</b>
c	Pelaporan Kinerja	15%	<b>11,84</b>
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	<b>21,41</b>
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100%</b>	<b>82,60</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b> <b>(Memuaskan)</b>

Selain memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, hasil evaluasi yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan pada beberapa indikator kinerja;
4. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Rekomendasi yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja internal agar senantiasa melakukan upaya inovasi sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan pada lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melengkapi formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja atas setiap indikator yang digunakan, serta menetapkan target yang *achievable* agar memenuhi kriteria SMART;
3. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (Aplikasi) pada seluruh unit kerja;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja; dan
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Pendidikan untuk mencapainya.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

- Misi 2** : Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
- Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi dasar penetapan Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

- Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- Indikator** : Indeks Pendidikan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- Sasaran 1** : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan
- Sasaran 2** : Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- Sasaran 3** : Meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus



## B. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA  
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

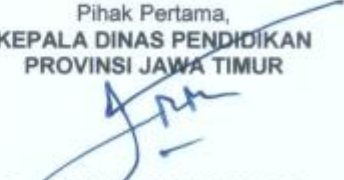
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

  
**Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630127 198903 1 005

Indikator kinerja Dinas Pendidikan yang tertuang dalam perjanjian kinerja beserta nilai targetnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	81,30
2.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1. APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)	72,37%
3.	Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	1. Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	73,00%

Selain target pencapaian indikator sasaran, pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga memuat program-program yang dilaksanakan. Adapun Program yang dilaksanakan pada P-APBD 2022 adalah sebagai berikut:

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.907.718.129.453,00	P-APBD
	Rp. 1.253.037.217.000,00	APBN
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 1.546.183.385.780,00	P-APBD
	Rp. 2.812.582.495.623,00	P-APBN
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 5.358.902.409,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.520.702.013.377,00</b>	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Gambaran Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari tercapainya 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan;
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
3. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus.

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut.

**TABEL 3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>0,65 nilai indeks</b>	<b>0,64 nilai indeks</b>	<b>98,46%</b>
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	1.1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	81,30 nilai indeks	82,60 nilai indeks	101,59%
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.1. APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)	72,37%	75,41%	104,20%
3. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	3.1. Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	73,00%	73,58%	100,79%

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan yang tersaji pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan yang merupakan Indikator Tujuan tercapai

sebesar 0,64 nilai indeks. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, indikator sarasanya tercapai sebesar 101,59%. Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, terdapat satu indikator yang tidak tercapai yaitu sebesar 104,20%. Sedangkan Sasaran Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus tercapai sebesar 108,33%. Analisis mengenai Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian sasaran dapat dilihat pada Bab III Huruf A. Poin 2.

Untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan capaian, maka dilakukan perbandingan capaian pada Tahun 2021 dengan capaian pada Tahun 2020. Adapun perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			Th. 2021	Th. 2022
1	2	3	4	5
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>0,65 nilai indeks</b>	<b>0,634 nilai indeks</b>	<b>0,64 nilai indeks</b>
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	1.1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	81,30 nilai indeks	82,05 nilai indeks	82,60 nilai indeks
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.1. APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)	72,37%	74,47%	75,41%
3. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	3.1. Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	73,00%	63,30%	73,58%

Berdasarkan Perbandingan Realisasi Kinerja yang tersaji pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan mengalami kenaikan capaian, meskipun hanya 0,006 nilai indeks. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan juga mengalami kenaikan, indikator nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 0,45 nilai indeks. Sasaran

Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, indikator APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB) mengalami kenaikan sebesar 0,94%. Sedangkan Sasaran Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus, indikator Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus juga mengalami kenaikan sebesar 10,28%. Analisis mengenai Penyebab Peningkatan/Penurunan pencapaian sasaran dapat dilihat pada Bab III Huruf A. Poin 2.

Dalam pencapaian kinerja tentunya perlu didukung oleh dukungan anggaran. Adapun dukungan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja, tersaji dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

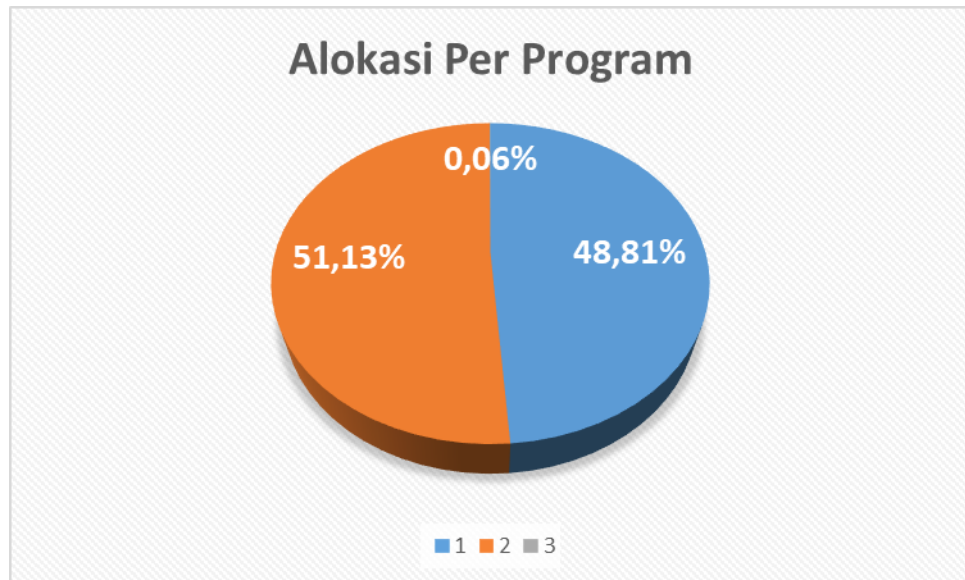
**TABEL 3.4**  
**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>% ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Rp. 8.524.880.130.265,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	1.1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Rp. 4.160.755.346.453,00	48,81%
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.1. APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)	Rp. 4.358.765.881.403,00	51,13%
3. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	3.1. Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	Rp. 5.358.902.409,00	0,06%

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar dialokasikan untuk mendukung pencapaian Sasaran ke-2. Sedangkan alokasi anggaran terkecil dialokasikan untuk mendukung pencapaian Sasaran ke-3. Adapun

penggambaran alokasi anggaran di Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut.

**GAMBAR 3.1**  
**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**



Sasaran ke-2 mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan sasaran lainnya dikarenakan Sasaran-2 berfokus kepada Pengelolaan Pendidikan dari 3 bidang yaitu Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan, dan Khusus-Layanan Khusus, Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengelolaan Pendidikan di 24 Cabang Dinas masing-masing wilayah Kabupaten/Kota yang membutuhkan anggaran paling besar. Sedangkan Sasaran-3 mendapat alokasi anggaran paling kecil dikarenakan Sasaran-3 hanya mengampu satu bidang saja yaitu bidang pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Untuk mengetahui pencapaian realisasi anggaran, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut.

**TABEL 3.5**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>0,65 nilai indeks</b>	<b>0,64 nilai indeks</b>	<b>98,46%</b>	<b>Rp. 8.524.880.130.265,00</b>	<b>Rp. 8.127.235.603.075,68</b>	<b>95,34%</b>
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	1.1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	81,30 nilai indeks	82,60 nilai indeks	101,59%	Rp. 4.160.755.346.453,00	Rp. 3.878.843.239.382,72	93,22%
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.1. APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)	72,37%	75,41%	104,20%	Rp. 4.358.765.881.403,00	Rp. 4.243.707.479.683,96	97,36%
3. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	3.1. Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	73,00%	73,58%	100,79%	Rp. 5.358.902.409,00	Rp. 4.684.884.009,00	87,42%

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa untuk mensukseskan Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.524.880.130.265,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.127.235.603.075,68 atau 95,34%. Dengan membandingkan capaian kinerja dan capaian anggaran dapat dihitung efisiensi penggunaan anggaran. Analisis mengenai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Bab III Huruf A. Poin 3.

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Berdasarkan Gambaran Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, diperoleh bahwa sebagian besar indikator sasaran bisa tercapai. Tentunya perlu diuraikan penyebab keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian sasaran serta dirumuskan alternatif solusi agar keberhasilan pencapaian dapat dipertahankan di Tahun berikutnya. Adapun analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan beserta alternatif solusi diuraikan sebagai berikut.

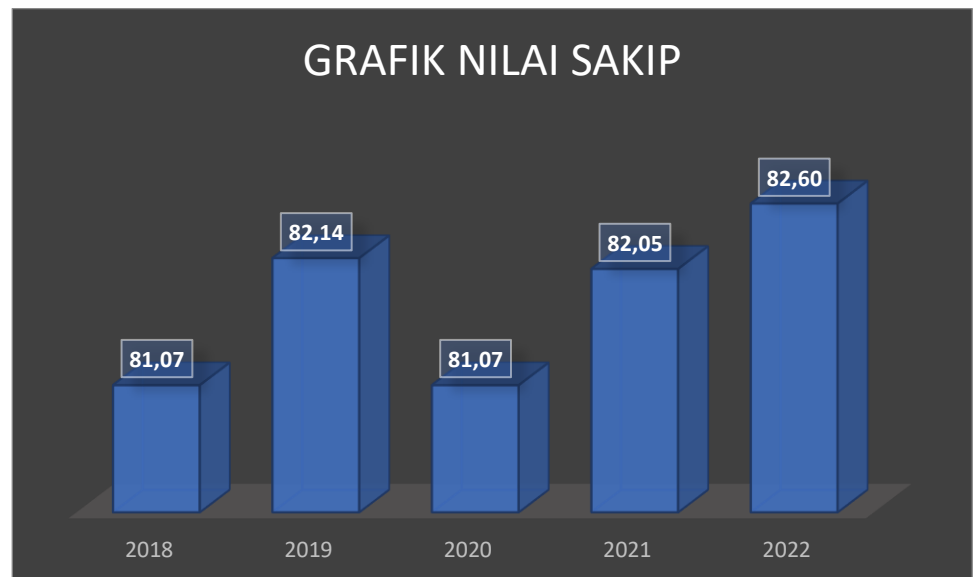
### a. Indikator 1.1 Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 81,30 nilai indeks dan tercapai sebesar 82,60 nilai indeks atau sebesar 101,59%, dengan kata lain Indikator 1.1 tercapai. Tercapainya Indikator Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dikarenakan :

- 1.) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
- 2.) Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis tercapai

**GAMBAR 3.2**

**GRAFIK NILAI SAKIP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**



Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021, dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan. Meningkatnya Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas



Pendidikan Provinsi Jawa Timur dikarenakan adanya evaluasi internal dan tindak lanjut terhadap laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021.

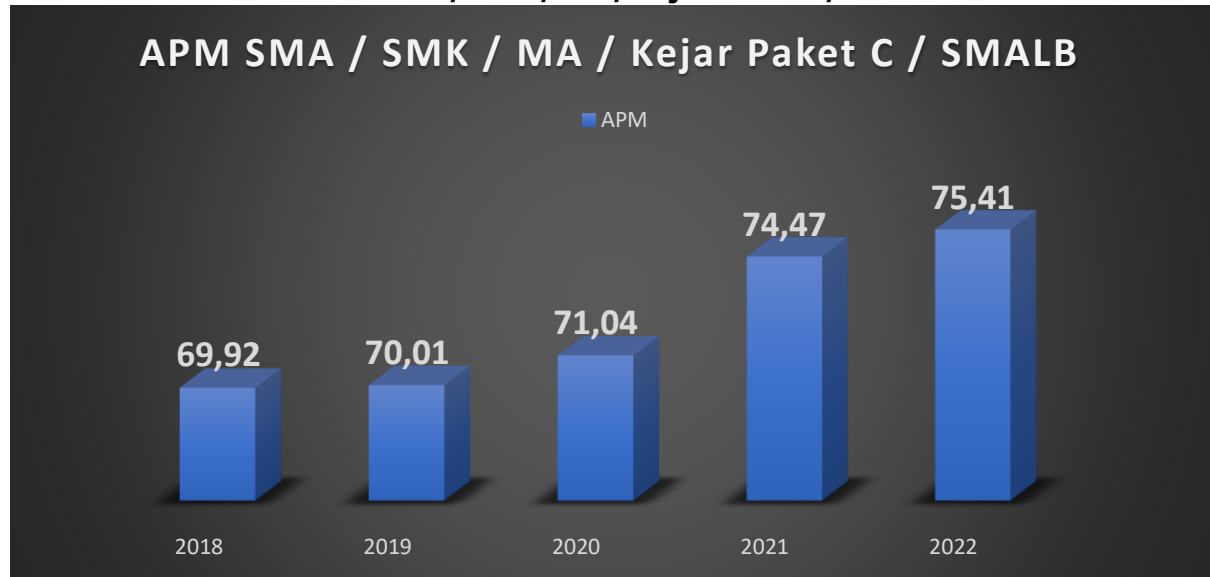
Alternatif solusi yang dapat dilakukan agar di Tahun berikutnya terjadi peningkatan capaian adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja internal agar senantiasa melakukan upaya inovasi sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melengkapi formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja atas setiap indikator yang digunakan, serta menetapkan target achievable agar memenuhi kriteria SMART;
3. Memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penrapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja;

b. Indikator 2.1 APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)

APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB) ditargetkan sebesar 72,37% dan tercapai sebesar 75,41% atau sebesar 104,20%, dengan kata lain Indikator 2.1 tercapai. Tercapainya APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB) dikarenakan jumlah anak usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB di Tahun (n) melebihi target jumlah anak yang bersekolah di Tahun (n-1), mereka masuk sekolah di usia 16 Tahun dan lulus sekolah dengan tepat waktu di usia 18 Tahun.

**GAMBAR 3.3**  
**APM SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB**



Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021, dapat dilihat bahwa APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB) meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya jumlah anak usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB meningkat jika dibandingkan dengan jumlah anak yang bersekolah di Tahun sebelumnya, mereka masuk sekolah di usia 16 Tahun dan lulus sekolah dengan tepat waktu di usia 18 Tahun.

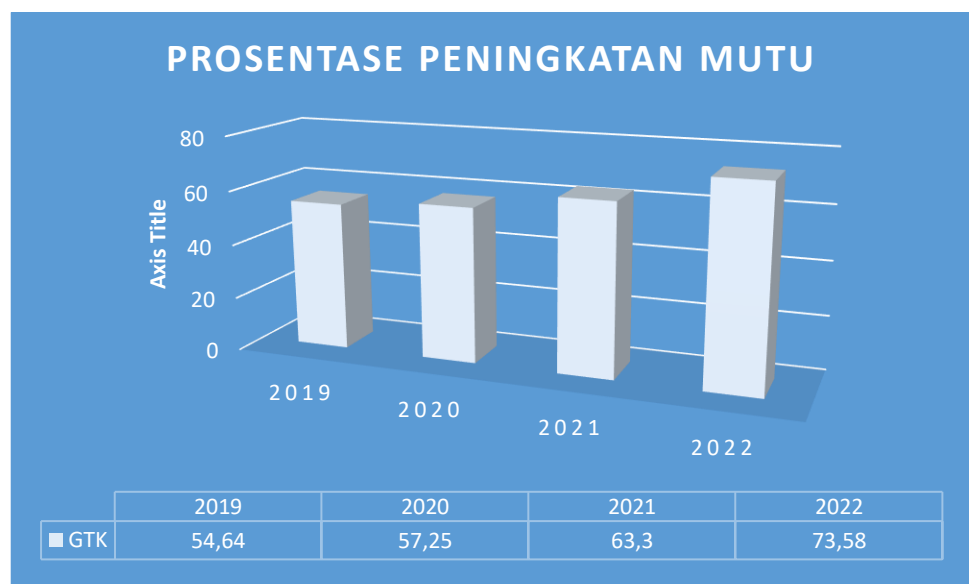
Alternatif solusi yang dapat dilakukan agar di Tahun berikutnya terjadi peningkatan capaian adalah sebagai berikut.

1. Tetap memberikan BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) untuk Sekolah Negeri maupun Swasta;
2. Menyusun program penelusuran anak tidak sekolah dan mengajak kembali ke sekolah baik sekolah formal maupun non formal;
3. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah. Sehingga apabila terdapat potensi siswa putus sekolah, dapat segera tertangani.

- c. Indikator 3.1 Prosentase Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus

Prosentase Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus ditargetkan sebesar 73,00% dan tercapai sebesar 73,58% atau sebesar 100,79%, dengan kata lain Indikator 3.1 tercapai. Indikator Prosentase Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus memiliki 3 komponen pendukung yaitu prosentase pemenuhan ketersediaan GTK sesuai dengan SPM, prosentase GTK yang mendapatkan kesejahteraan, dan prosentase GTK yang mendapatkan perlindungan profesi. Tercapainya indikator tersebut dikarenakan adanya peningkatan salah satu komponen pendukung yaitu prosentase pemenuhan ketersediaan GTK sesuai dengan SPM, komponen ini dilihat berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi, kompetensi, serta karir guru. Kualifikasi guru disini berdasarkan pendidikan terakhir guru minimal D4/S1, sertifikasi guru dilihat dari pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional.

**GAMBAR 3.4**  
**Prosentase Peningkatan Mutu GTK bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus**



Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021, dapat dilihat bahwa Prosentase Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya jumlah GTK yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), GTK yang mendapatkan kesejahteraan, dan GTK yang mendapatkan perlindungan profesi meningkat dari Tahun 2021 ke Tahun 2022.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan agar di Tahun berikutnya terjadi peningkatan capaian adalah sebagai berikut.

1. Mengadakan seminar terkait pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan khusus;
2. Melakukan perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan khusus;
3. Melakukan penataan pendistribusian guru dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan khusus;
4. Meningkatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapat peningkatan penghasilan, berkualifikasi S2, bersertifikasi profesi guru, serta yang mendapatkan perlindungan profesi.

### 3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran, perlu dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Adapun tingkat efisiensi masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

**TABEL 3.6**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>EFISIENSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>98,46%</b>	<b>95,34%</b>	<b>3,12</b>
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	1.1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	101,59%	93,22%	8,37

<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>EFISIENSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.1. APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)	104,20%	97,36%	6,84
3. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	3.1. Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	100,79%	87,42%	13,37

Berdasarkan Tabel 3.6, dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan Tujuan Dinas Pendidikan terbilang efisien karena nilai indeks capaian kinerja dibanding capaian anggaran melebihi angka 1. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efisiensi pencapaian tujuan yaitu sebesar 3,12%.

Tingkat efisiensi pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan) diukur dari indikator Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terbilang efisien karena memiliki nilai efisiensi lebih dari 1 yaitu 8,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan.

Tingkat efisiensi pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus) diukur dari APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB) terbilang efisien karena memiliki nilai efisiensi lebih dari 1, yaitu 6,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang ada dapat digunakan dengan efisien untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Tingkat efisiensi pencapaian Sasaran 3 (Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus) adalah sebesar 13,37%, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran ini adalah efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang ada dapat digunakan dengan efisien untuk

meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus.

#### 4. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan masing-masing sasaran, akan dijabarkan untuk masing-masing indikator sasaran sebagai berikut.

##### a. Indikator 1.1 Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur didukung oleh 3 program dan 13 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.7**  
**PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1.1**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Indikator Program yang Tercapai	83,43%	83,43%	100,00%
	Prosentase Realisasi Anggaran	91%	93,22%	102%
	Indeks Profesionalisme ASN	88,50	88,50	100,00%
	Prosentase Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil kegiatan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100,00%
	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	12 laporan	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	115 dokumen	115 dokumen	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	66 dokumen	66 dokumen	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341 dokumen	341 dokumen	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	30 dokumen	30 dokumen	100,00%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 4 indikator program tercapai, antara lain Prosentase indikator program yang tercapai, prosentase realisasi anggaran, indeks profesionalisme ASN, prosentase penyampaian laporan yang tepat waktu, semua indikator ini memiliki capaian sebesar 100,00%. Program ini dapat tercapai dikarenakan seluruh dokumen perencanaan dapat tersusun sesuai target dan dapat dimanfaatkan dengan baik serta seluruh indikator kegiatan yang dilaksanakan tercapai 100,00%.

Selain itu, Program ini didukung oleh 8 kegiatan dimana seluruh kegiatan tercapai sebesar 100,00%.

b. Indikator 2.1 APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB)

Pencapaian Indikator Kinerja APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB) didukung oleh 22 program dan 24 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

indikator kinerja APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB) adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.8**  
**PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2.1**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA</b>	<b>40,64 %</b>	<b>30,79 %</b>	<b>75,76 %</b>
	<b>Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK</b>	<b>33,62 %</b>	<b>44,88 %</b>	<b>133,49 %</b>
	<b>Prosentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus</b>	<b>30,70%</b>	<b>30,82%</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan SPM</b>	<b>55,7 %</b>	<b>55,7 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/ sistem dalam proses belajar mengajar</b>	<b>32 %</b>	<b>32 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase Peserta yang lulus kompetensi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sidoarjo dan Surabaya</b>	<b>84,02 %</b>	<b>84,02 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>rosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sidoarjo dan Surabaya</b>	<b>43,08 %</b>	<b>43,08 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Malang;</b>	<b>92,18 %</b>	<b>92,18 %</b>	<b>100,00 %</b>



<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Malang;	68,94 %	68,94 %	100,00 %
	Prosentasewarga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Madiun	74,31 %	74,31 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Madiun	48,35 %	48,35 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kediri	67,89 %	67,89 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kediri	50,59 %	50,59 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Mojokerto	83,51 %	83,51 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Mojokerto	36,97 %	36,97 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Blitar	64,09 %	64,09 %	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Blitar	51,01%	51,01 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pasuruan	62,06 %	62,06 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pasuruan	38,64 %	38,64 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Probolinggo	67,82 %	67,82 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Probolinggo	21,18 %	21,18 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Gresik	82,56 %	82,56 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Gresik	25,98 %	25,98 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jombang	92 %	92 %	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jombang	39,49 %	39,49 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bojonegoro	75,99 %	75,99 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bojonegoro	34,38 %	34,38 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Lamongan	88,98 %	88,98 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Lamongan	17,69 %	17,69 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Ponorogo	78,04 %	78,04%	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo	28,96 %	28,96 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pacitan	72,8 %	72,8 %	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pacitan	55,16 %	55,16 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Nganjuk	83,49 %	83,49%	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Nganjuk	37,64 %	37,64 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Tulungagung	70,7 %	70,7%	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Tulungagung	37,05 %	37,05 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kabupaten Malang	70,08 %	70,08 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Malang	24,26 %	24,26 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jember	64,34 %	64,34 %	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jember	27,25 %	27,25 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bondowoso	64,05 %	64,05%	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bondowoso	14,58 %	14,58 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Banyuwangi	73,11 %	73,11 %	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah banyuwangi	50,8 %	50,8%	100,00 %
	Prosentase warga negara a usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pamekasan	62,81 %	62,81%	100,00 %
	Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pamekasan	16,73 %	16,73 %	100,00 %
	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sampang	39,72 %	39,72%	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sampang</b>	<b>6,13 %</b>	<b>6,13 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kab. Sumenep</b>	<b>66,41 %</b>	<b>66,41%</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sumenep</b>	<b>14,92 %</b>	<b>14,92 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bangkalan</b>	<b>48,95 %</b>	<b>48,95%</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bangkalan</b>	<b>8,43 %</b>	<b>8,43 %</b>	<b>100,00 %</b>
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan	<b>175 orang</b>	<b>175 orang</b>	100,00 %
	Jumlah peserta didik yang memiliki bakat istimewa	231 orang	231 orang	100,00 %
	jumlah Satuan Pendidikan yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional	1547 lembaga	1547 lembaga	100,00 %
	Jumlah SMA yang berstandar nasional	1547 lembaga	1547 lembaga	100,00 %
	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMA berkualifikasi minimal S1/D4 dan mendapat	10134 orang	10134 orang	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	tambahan kesejahteraan dan berprestasi			
	Jumlah peserta yang mendapatkan pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi jenjang SMA	651 orang	651 orang	100,00 %
	Jumlah produk konten pendidikan / pembelajaran jenjang SMA	150 produk	150 Produk	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah Sidoarjo	203 lembaga	203 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah MALANG	59 lembaga	59 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah MADIUN	46 lembaga	46 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah KEDIRI	48 lembaga	48 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah MOJOKERTO	51 lembaga	51 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BLITAR	33 lembaga	33 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PASURUAN	53 lembaga	53 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PROBOLINGGO	90 lembaga	90 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah GRESIK	53 lembaga	53 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah JOMBANG	47 lembaga	47 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BOJONEGORO	86 lembaga	86 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah LAMONGAN	72 lembaga	72 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PONOROGO	42 lembaga	42 lembaga	100,00 %

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PACITAN	11 lembaga	11 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah NGANJUK	29 lembaga	29 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah TULUNGAGUNG	41 lembaga	41 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah KAB MALANG	72 lembaga	72 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah JEMBER	94 lembaga	94 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BONDOWOSO	47 lembaga	47 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BANYUWANGI	50 lembaga	50 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PAMEKASAN	79 lembaga	79 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah SAMPANG	82 lembaga	82 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah SUMENEP	86 lembaga	86 lembaga	100,00 %
	jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BANGKALAN	71 lembaga	71 lembaga	100,00 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang berstandart Nasional	2158 lembaga	2167 Lembaga	100,42 %
	Jumlah satuan pendidikan yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional	2158 lembaga	2167 Lembaga	100,42 %
	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	779 lembaga	521 lembaga	66,88 %
	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMK berkualifikasi minimal S1/D4 dan mendapat tambahan kesejahteraan dan berprestasi	12677 orang	12615 orang	99,51 %
	Jumlah peserta yang mendapatkan pembelajaran Teknologi	1634 orang	1634 orang	100,00 %



<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	informasi dan komunikasi jenjang SMK			
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	2423 orang	2423 orang	100,00 %
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan inkubator bisnis dan kompetensi vokasi	1702 orang	1702 orang	100,00 %
	Jumlah produk konten pendidikan / pembelajaran jenjang SMK	50 Produk	50 Produk	100,00 %
	Jumlah dokumen Materi pelatihan	60 Dokumen	60 Dokumen	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah Sidoarjo	203 Lembaga	203 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MALANG	59 Lembaga	59 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MADIUN	46 Lembaga	46 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah KEDIRI	48 Lembaga	48 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MOJOKERTO	51 Lembaga	51 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BLITAR	33 Lembaga	33 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PASURUAN	53 Lembaga	53 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PROBOLINGGO	90 Lembaga	90 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah GRESIK	53 Lembaga	53 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah JOMBANG	47 Lembaga	47 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BOJONEGORO	86 Lembaga	86 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah LAMONGAN	72 Lembaga	72 Lembaga	100,00 %

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PONOROGO	42 Lembaga	42 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PACITAN	11 Lembaga	11 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah NGANJUK	29 Lembaga	29 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah TULUNGAGUNG	41 Lembaga	41 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah KAB MALANG	72 Lembaga	72 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah JEMBER	94 Lembaga	94 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BONDOWOSO	47 Lembaga	47 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BANYUWANGI	93 Lembaga	93 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PAMEKASAN	79 Lembaga	79 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SAMPANG	82 Lembaga	82 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SUMENEP	86 Lembaga	86 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BANGKALAN	71 Lembaga	71 Lembaga	100,00 %
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan sarana prasarana	395 lembaga	395 lembaga	100,00 %
	Jumlah satuan pendidikan PK PLK yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional	358 lembaga	358 lembaga	100,00 %
	Jumlah pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berstandar nasional	420 Lembaga	420 Lembaga	100,00 %
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan PK-PLK yang ditingkatkan kompetensinya	583 Lembaga	583 Lembaga	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Jumlah peserta yang mendapatkan pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi jenjang PK-PLK	50 Orang	50 Orang	100,00 %
	Jumlah produk konten pendidikan / pembelajaran Jenjang PK-PLK	50 Produk	50 Produk	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	75 Lembaga	75 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Malang	23 Lembaga	23 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kota Malang dan kota Batu	23 Lembaga	23 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Ponorogo dan magetan	34 Lembaga	34 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Tulungagung dan Trenggalek	14 Lembaga	14 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Gresik	18 Lembaga	18 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto	15 Lembaga	15 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Jombang	10 Lembaga	10 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Bojonegoro	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Lamongan	18 Lembaga	18 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah kabupaten Madiun dan kota Madiun	18 Lembaga	18 Lembaga	100,00 %

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Pacitan	8 Lembaga	8 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah kabupaten Kediri dan Kota Kediri	15 Lembaga	15 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Nganjuk	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah kabupaten Blitar dan Kota Blitar	28 Lembaga	28 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan	16 Lembaga	16 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo	14 Lembaga	14 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Jember	21 Lembaga	21 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Bondowoso dan Situbondo	11 Lembaga	11 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Banyuwangi	49 Lembaga	49 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Pamekasan	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Sampang	3 Lembaga	3 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Sumenep	5 Lembaga	5 Lembaga	100,00 %
	Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Bangkalan	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00 %
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>Prosentase penyediaan layanan akses di jenjang SMK</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Metode	0 lembaga	0 lembaga	0%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembelajaran Teaching Factory (TEFA)			
	Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diseleraskan kualitas SMK dengan Industri	0 orang	0 orang	0%
	Jumlah sekolah yang memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK)	0 lembaga	0 lembaga	0%
	Jumlah lembaga yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri	0 lembaga	0 lembaga	0%
	Jumlah sekolah yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1	0 lembaga	0 lembaga	0%

Program Pengelolaan Pendidikan, terdapat indikator program yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan terbatasnya monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah. Sehingga apabila terdapat potensi siswa putus sekolah, dapat segera tertangani.

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, indikator yang diampu telah mencapai target, bahkan melebihi target dikarenakan realisasi programnya berada jauh di atas target.

Program ini didukung oleh 24 kegiatan dimana sebagian besar indikator kegiatan tercapai sebesar 100%.

- c. Indikator 3.1 Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus

Pencapaian Indikator Kinerja Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.9**  
**PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN 3.1**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>100,00 %</b>
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA/SMK/PKLK yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan	33015 Orang	28709 Orang	85,05 %

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki 1 indikator program dan mencapai 100%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dimana indikator kegiatannya tercapai sebesar 85,05%. Hal ini disebabkan karena belum bisa memenuhi kebutuhan standar rasio guru dibanding murid yaitu 1:15.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **1. REALISASI BELANJA**

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 8.524.880.130.265,00. Adapun realisasinya sebesar Rp. 8.127.103.000.942,68 atau 95,33%. Adapun rincian realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 3.10**  
**REALISASI BELANJA**

Nama Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rp. 4.160.755.346.453,00</b>	<b>Rp. 3.878.710.637.249,72</b>	<b>93,22</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp. 2.453.272.000,00	Rp. 2.390.568.121,00	97,44
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp. 4.029.648.872.474,00	Rp3.749.171.785.142,72	93,04

<b>Nama Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Rp. 265.212.000,00	Rp. 264.060.550,00	99,57
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp. 4.050.432.968,00	Rp. 3.876.830.482,00	95,71
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp. 95.551.461.366,00	Rp. 95.106.109.744,00	99,53
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp. 3.088.402.492,00	Rp. 3.042.592.612,00	98,52
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 18.787.004.829,00	Rp. 18.036.580.203,00	96,01
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 6.910.688.324,00	Rp. 6.822.110.395,00	98,72
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Rp. 4.358.765.881.403,00</b>	<b>Rp. 4.243.707.479.683,96</b>	<b>97,36</b>
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>	Rp. 1.590.495.585.995,00	Rp. 1.539.264.162.303,96	96,78
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</i>	Rp. 2.569.736.425.730,00	Rp. 2.524.275.182.324,00	98,23
<i>Pengelolaan Pendidikan Khusus</i>	Rp. 198.533.869.678,00	Rp. 180.168.135.056,00	90,75
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Rp. 5.358.902.409,00</b>	<b>Rp. 4.684.884.009,00</b>	<b>87,42</b>
<i>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>	Rp. 5.358.902.409,00	Rp. 4.684.884.009,00	87,42
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 8.524.880.130.265,00</b>	<b>Rp. 8.127.103.000.942,68</b>	<b>95,33</b>

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat dua program yang dilaksanakan terserap di atas 90% yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pengelolaan Pendidikan. Namun, terdapat satu program yang dilaksanakan terserap di bawah 90% yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **2. REALISASI PENDAPATAN**

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar Rp. 963.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.005.842.185,03 atau 935,19%. Adapun rincian pendapatan asli daerah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 3.11**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Nama Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>20,60</b>
Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00	10.300.000,00	20,60
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>913.000.000,00</b>	<b>8.995.542.185,03</b>	<b>985,27</b>
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	913.000.000,00	910.060.000,00	99,68
Jasa Giro	0,00	4.348.034.602,33	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	580.741.130,00	
Pendapatan dari Pengembalian	0	3.444.394.452,70	
Pendapatan BLUD	0	(287.688.000,00)	
<b>JUMLAH</b>	<b>963.000.000,00</b>	<b>9.005.842.185,03</b>	<b>935,19%</b>

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa satu dari dua komponen PAD tidak terpenuhi yaitu Retribusi Daerah. Sedangkan komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah telah terpenuhi sebesar 985,27%.

### **C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur, maka perlu dilakukan telaah dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Dalam Laporan Hasil Evaluasi terdapat tiga poin penting yang perlu ditindaklanjuti yaitu hasil evaluasi, rekomendasi serta kenaikan/penurunan nilai.

#### **1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Untuk meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan disusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan perolehan Hasil Evaluasi Tahun 2022. Adapun rencana tindak lanjut Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut.



**TABEL 3.12**  
**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

No.	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Tahun 2021		Tahun 2022										
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah meningkatkan penerapan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja	Memperbaiki kualitas evaluasi internal		v			v				v			v	
2	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun, mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana			v										
3	Penyusunan dokumen perencanaan belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan pada beberapa indikator kinerja	Menyusun konsep indikator kinerja yang baru yang mampu mengukur kinerja Dinas Pendidikan			v	v								v	v
		Mengkonsultasikan Draft Indikator Kinerja Kepada BAPPEDA dan Biro Organisasi			v	v								v	v
4	Pelaksanaan reuiu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik	Melakukan Rapat Pimpinan Terbatas terkait hasil monitoring sebagai bahan untuk merumuskan solusi pencapaian kinerja		v	v										
		Melakukan monitoring dan evaluasi atas Perkembangan Kinerja	v				v			v			v		

## 2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan disusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan perolehan Rekomendasi Tahun 2022. Adapun rencana tindak lanjut Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.13  
TINDAK LANJUT REKOMENDASI**

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tahun 2021		Tahun 2022													
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja internal	Memberikan Diklat/Kursus sebagai upaya peningkatan kualitas SDM							v									
		Melakukan manajemen SDM terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	v	v	v	v												
		Melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dengan melakukan manajemen indikator kinerja SDM	v	v	v	v	v											
		Mendorong pelaksanaan satu bidang satu inovasi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
2	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melengkapi formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja atas setiap indikator yang digunakan, serta menetapkan target yang achievable agar memenuhi kriteria SMART	Mereviu dokumen perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja individu	v	v	v	v												
3	Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Melakukan Rapat Pimpinan Terbatas sebagai upaya monitoring capaian kinerja		v			v			v					v			
4	Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan pengembangan	Mereviu analisis jabatan dan analisis beban kerja yang berorientasi pemanfaatan IT di setiap unit kerja						v	v									

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tahun 2021		Tahun 2022												
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Teknologi Informasi (Aplikasi) pada seluruh unit kerja	Menyusun rencana pembuatan aplikasi terkait implementasi akuntabilitas kinerja di masing-masing bidang/UPT					v										
5	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja	Mereviu tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya	v														
		Pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Memperbaiki kualitas evaluasi internal		v			v			v					v		

### 3. Tindak Lanjut Kenaikan/Penurunan Nilai Akuntabilitas

Untuk meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan disusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan perolehan Nilai Akuntabilitas Tahun 2020. Adapun rencana tindak lanjut Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.14**  
**RENCANA TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2022 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan Tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan Dinas Pendidikan belum tercapai sedangkan di tingkat sasaran, semua indikator sasaran telah tercapai.

Dari segi efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator tujuan Dinas Pendidikan dapat dikatakan efisien. Sedangkan di tingkat sasaran terdapat tiga indikator menunjukkan efektifitas penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan maka ditunjang oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Jumlah program yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 44 program dan yang tercapai indikator kinerjanya adalah sebanyak 27 program atau 61,36%. Sedangkan, jumlah kegiatan yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 173 kegiatan dan tercapai indikator kinerjanya sebanyak 151 kegiatan atau sebesar 87,28%.

#### **B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab III, dapat diinventarisasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pencapaian kinerja baik di tingkat sasaran maupun program sebagai berikut.

##### **1. Permasalahan Pencapaian Kinerja Sasaran dan Strategi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan hasil analisis pada BAB III dapat diketahui bahwa semua indikator sasaran tidak memiliki permasalahan dan ketiganya mencapai target, yaitu nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar Paket C/SMALB), dan Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus.

## 2. Permasalahan Pencapaian Kinerja Program dan Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat 10 indikator program yang tidak tercapai. Dari 10 indikator program yang tidak tercapai tersebut dapat dirumuskan permasalahan dan strategi pemecahan masalah sebagai berikut.

**TABEL 4.1**  
**PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN**  
**BERDASARKAN PENCAPAIAN PROGRAM**

No	Indikator Program	Permasalahan	Strategi Pemecahan Masalah
1	Prosentase indikator program yang tercapai pada SMK BLUD – SMKN 2 Bondowoso, SMKN 1 Buduran Sidoarjo, SMKN 1 Panji Situbondo, SMKN 1 Glagah Banyuwangi, SMKN 3 Buduran Sidoarjo, SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi, SMKN 1 Surabaya, SMKN 1 Pacitan, SMKN 3 Boyolangu	Jumlah unit produksi yang dihasilkan tidak mencapai target	Mendorong adanya inovasi agar program-program dapat terlaksana dalam suasana pandemi  Mengoptimalkan program peningkatan pelayanan BLUD
2	Prosentase realisasi anggaran pada SMK BLUD – SMKN 3 Madiun, SMKN 6 Surabaya, SMKN 3 Boyolangu, SMKN 5 Jember, SMKN 1 Tegalampel Bondowoso, SMKN 1 Pacitan, SMKN 4 Malang, SMKN 1 Jenangan, SMKN 3 Buduran Sidoarjo, SMKN 1 Glagah Banyuwangi, SMKN 1 Panji Situbondo, SMKN 1 Buduran Sidoarjo,	Adanya perubahan masterplan dikarenakan adanya perubahan anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Induk agar pelaksanaan dokumentasi ketatausahaan dan kepegawaian tetap terlaksana dengan baik di masa pandemi COVID-19
3	APM SMA/Sederajat Wilayah Kabupaten Malang	Terbatasnya monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang	Meningkatkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terkait proses belajar mengajar di sekolah agar tetap terlaksana dengan baik di masa pandemi COVID-19

No	Indikator Program	Permasalahan	Strategi Pemecahan Masalah
		berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah	
4	APM SMA/Sederajat Wilayah Ponorogo	Terbatasnya monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah	Meningkatkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terkait proses belajar mengajar di sekolah agar tetap terlaksana dengan baik di masa pandemi COVID-19
5	APM SMA/Sederajat Wilayah Gresik	Terbatasnya monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah	Meningkatkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terkait proses belajar mengajar di sekolah agar tetap terlaksana dengan baik di masa pandemi COVID-19
6	APM SMA/Sederajat Wilayah Lamongan	Terbatasnya monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah	Meningkatkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terkait proses belajar mengajar di sekolah agar tetap terlaksana dengan baik di masa pandemi COVID-19
7	APM SMA/Sederajat Wilayah Kediri	Terbatasnya monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah	Meningkatkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terkait proses belajar mengajar di sekolah agar tetap terlaksana dengan baik di masa pandemi COVID-19
8	APM SMA/Sederajat Wilayah Pasuruan	Terbatasnya monitoring dan evaluasi dari Cabang Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah, apakah ada yang berhenti sekolah karena meninggal, sakit, bekerja, menikah, atau tidak ada minat untuk sekolah	Meningkatkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terkait proses belajar mengajar di sekolah agar tetap terlaksana dengan baik di masa pandemi COVID-19
9	Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi	masih adanya guru dan tenaga kependidikan yang belum memiliki perlindungan profesi	Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha terkait pemberian perlindungan profesi seperti perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak adil, pembatasan terhadap penyampaian pendapat, pelecehan terhadap profesi, dan perlindungan profesi atas pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat tugas guru dalam melaksanakan tugas

No	Indikator Program	Permasalahan	Strategi Pemecahan Masalah
10	Prosentase pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal	masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum berkompeten di bidangnya, serta masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum mendapatkan layanan manajemen karir	Mengoptimalkan pemberian layanan manajemen karir kepada guru dan tenaga kependidikan serta memberikan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S2)



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **i. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra**

## ii. Perjanjian Kinerja



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA  
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

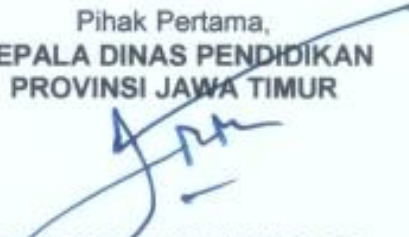
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Surabaya, 31 Oktober 2022  
Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

  
**Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630127 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	81,30	- Penguatan Internal - Anggaran
2.	Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus	2. APM Pendidikan Menengah (SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB)	72,37	Penerima Layanan
3.	Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus	3. Prosentase Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus	73,00	Penerima Layanan

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 2.910.145.648.196,00	P-APBD
	Rp 1.253.037.217.000,00	APBN
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 1.559.052.172.172,00	P-APBD
	Rp 2.793.108.073.600,00	P-APBN
3 Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp 5.358.902.409,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.520.702.013.377,00</b>	

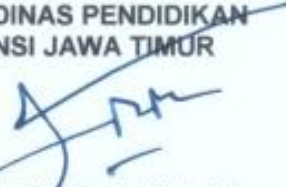
Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



*[Signature]*  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630127 198903 1 005

### iii. Rekapitulasi Data

iv. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD 2019-2024)

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Program	Pagu Anggaran
Kepala Daerah/ Gubernur	1	2	3	Eselon II	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>0,65</b>		<b>SASARAN 1</b>						<b>7.933.673.688.266</b>
					<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan di Tahun 2022	81,3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	83,43	4.039.430.112.792
							Persentase Realisasi anggaran		91		
							indeks Profesionalitas ASN		88,5		
							Prosentase Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil kegiatan tepat waktu		100		
		<b>SASARAN 2</b>									

			<b>Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus</b>	APM Pendidikan Menengah (SMA / SMK / MA / Kejar Paket C / SMALB)	72,374	Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase warga negarausia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA	40,64	3.890.842.112.077
				Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yg mendapatkan layanan pendidikan bermutu			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK	33,62	
							Prosentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	33,58	

							Prosentase pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan SPM	55,7	
							Prosentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/ sistem dalam proses belajar mengajar	32	
							Prosentase Peserta yang lulus kompetensi	100	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	84,02	

							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	43,08	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Malang;	92,18	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Malang;	68,94	



							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Madiun	74,31	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Madiun	48,35	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kediri	67,89	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk	50,59	

							Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kediri		
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Mojokerto	83,51	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Mojokerto	36,97	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang	64,09	

						pendidikan menengah Wilayah Blitar		
						Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Blitar	51,01	
						Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pasuruan	62,06	
						Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam	38,64	

							Pendidikan Khusus Wilayah Pasuruan		
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Probolinggo	67,82	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Probolinggo	21,18	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan	82,56	

							menengah Wilayah Gresik		
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Gresik	25,98	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jombang	92	

							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jombang	39,49	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bojonegoro	75,99	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bojonegoro	34,38	

							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Lamongan	88,98	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Lamongan	17,69	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Ponorogo	78,04	

							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo	28,96	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pacitan	72,8	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pacitan	55,16	



							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Nganjuk	83,49	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Nganjuk	37,64	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Tulungagung	70,7	

							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Tulungagung	37,05	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kabupaten Malang	70,08	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah	24,26	

						Kabupaten Malang		
						Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jember	64,34	
						Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jember	27,25	
						Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang	64,05	

							pendidikan menengah Wilayah Bondowoso		
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo	14,58	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Banyuwangi	73,11	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam	50,8	

							Pendidikan Khusus Wilayah banyuwangi		
							Prosentase warga negara a usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pamekasan	62,81	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pamekasan	16,73	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang	39,72	

							pendidikan menengah Wilayah Sampang		
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sampang	6,13	
							Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kab. Sumenep	66,41	
							Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam	14,92	

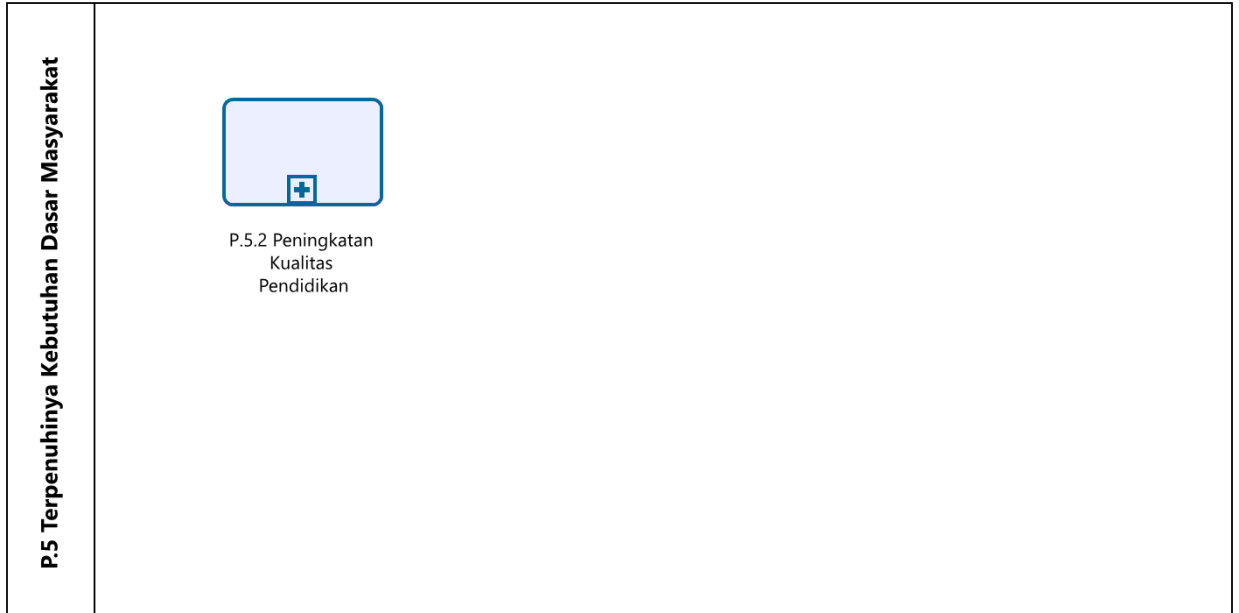


					<b>Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus</b>	Prosentase Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus	73	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi	85	3.401.463.397
								PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase lembaga yang mendapatkan rekomendasi	0	0

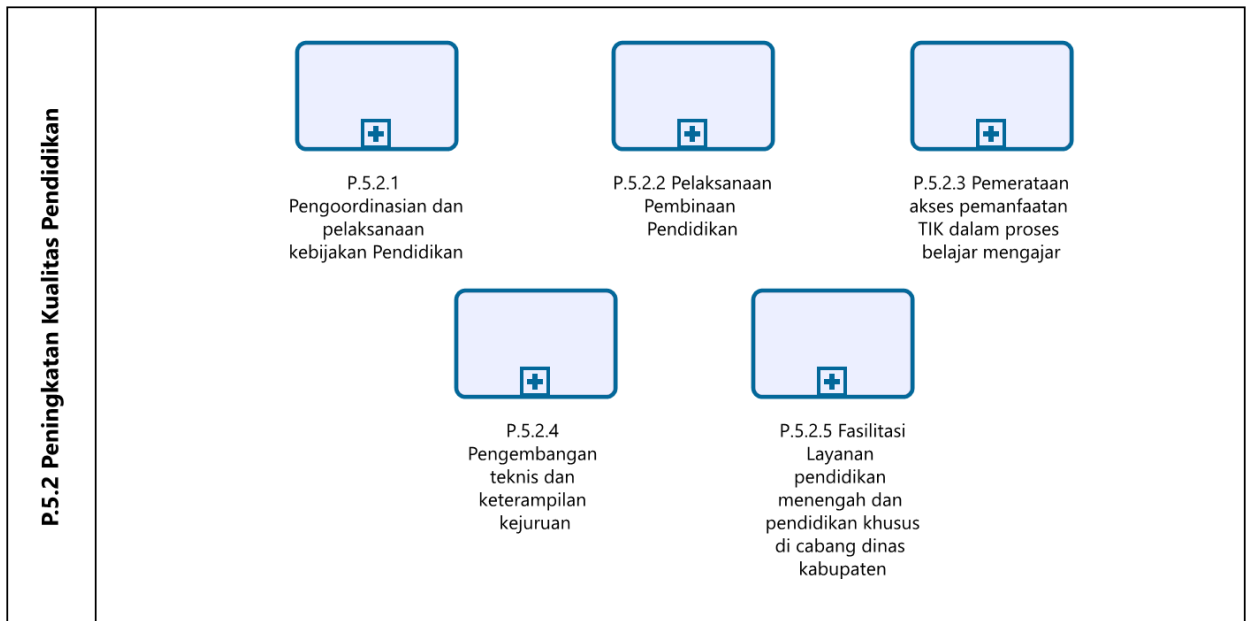


v. Peta Proses Bisnis

**GAMBAR 1.2**  
**PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**(bag.1)**













**GAMBAR 1.3**  
**PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (bag.2)**



## GAMBAR 1.4

### PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (bag.3)

<b>P.5.2.1 Pengoordinasian dan pelaksanaan Kebijakan Pendidikan</b>	<table border="0"><tr><td data-bbox="381 286 706 862"><p>P.5.2.1.1 Melakukan pemerataan kesempatan siswa usia 16-18 tahun bersekolah dijenjang menengah</p></td><td data-bbox="706 286 1031 862"><p>P.5.2.1.2 Melakukan pemerataan kesempatan partisipasi penduduk disabilitas usia 4-18 tahun</p></td><td data-bbox="1031 286 1443 862"><p>P.5.2.1.3 Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum</p></td></tr></table>	 <p>P.5.2.1.1 Melakukan pemerataan kesempatan siswa usia 16-18 tahun bersekolah dijenjang menengah</p>	 <p>P.5.2.1.2 Melakukan pemerataan kesempatan partisipasi penduduk disabilitas usia 4-18 tahun</p>	 <p>P.5.2.1.3 Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum</p>
 <p>P.5.2.1.1 Melakukan pemerataan kesempatan siswa usia 16-18 tahun bersekolah dijenjang menengah</p>	 <p>P.5.2.1.2 Melakukan pemerataan kesempatan partisipasi penduduk disabilitas usia 4-18 tahun</p>	 <p>P.5.2.1.3 Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum</p>		

<b>P.5.2.2 Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan</b>	 <p>P.5.2.2.1 Peningkatan layanan kebutuhan profesi pendidik dan tenaga kependidikan</p>
---	---

**P.5.2.3 Pemerataan akses pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar**

P.5.2.3.1  
Pengembangan metode belajar mengajar menggunakan TIK

P.5.2.3.3  
Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan

**P.5.2.4 Pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan**

P.5.2.4.1 Penyusunan dan pengembangan materi teknis keterampilan kejuruan

P.5.2.4.2 Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan

P.5.2.4.3 Pengembangan media teknis pelatihan dan bimbingan keterampilan kejuruan

P.5.2.4.4 Pelaksanaan dukungan kerjasama pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan

**P.5.2.5 Fasilitas Layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di cabang dinas kabupaten**



P.5.2.5.1  
Fasilitas Layanan pendidikan gratis berkualitas



P.5.2.5.2  
Fasilitas Layanan administrasi lembaga sekolah